



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 342 TAHUN 2022  
TENTANG  
KODE KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 342 TAHUN 2022  
TENTANG  
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

IN	INTELIJEN	
	<b>IN.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Intelijen</b>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan intelijen bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan dan pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen mulai dari penyiapan bahan, telaah, pemberian masukan dan pemberian dukungan, pengumpulan dan pengolahan data, laporan.
	<b>IN.01</b>	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen</b>
	IN.01.00	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.1 (Sektor Ideologi)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor ideologi.
	IN.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.2 (Sektor Politik)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor politik.
IN.01.02	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.3 (Sektor Pertahanan dan Keamanan)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor pertahanan dan keamanan.	

	IN.01.03	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.4 (Sektor Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor cegah tangkal, pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan, dan pengamanan penanganan perkara.
	IN.01.04	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.1 (Sektor Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor peredaran barang cetakan dan media komunikasi.
	IN.01.05	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.2 (Sektor Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor aliran kepercayaan masyarakat dan aliran keagamaan serta pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
	IN.01.06	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.3 (Sektor Ketahanan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor budaya dan kemasyarakatan.
	IN.01.07	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.4 (Sektor Pencegahan Konflik Sosial, Ketertiban, dan Ketenteraman Umum serta Pembinaan Masyarakat Taat Hukum)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor sosial, ketertiban, dan ketenteraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum.
IN.01.08	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.1 (Sektor Keuangan dan Kekayaan Negara)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor keuangan dan kekayaan negara.	
IN.01.09	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.2 (Sektor Investasi dan Penerimaan Negara)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor investasi dan penerimaan negara.	
IN.01.10	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.3 (Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan)	

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.
	IN.01.11	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.4 (Sektor Sumber Daya Alam dan Agraria/Tata Ruang)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor sumber daya alam dan agraria/tata ruang.
	IN.01.12	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.1 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor pengamanan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi.
	IN.01.13	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.2 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor pengamanan pembangunan infrastruktur pengairan, pertanian, dan kelautan.
	IN.01.14	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.3 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor pengamanan pembangunan infrastruktur energi, sumber daya alam, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	IN.01.15	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.4 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Pembangunan lainnya)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan intelijen pada sektor pengamanan pembangunan infrastruktur kawasan dan sektor lainnya.
<b>IN.02</b>	<b>Pengelolaan Produk Intelijen</b>	
	IN.02.00	Perkiraan Keadaan Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perkiraan keadaan intelijen.
	IN.02.01	Pemetaan Potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

	IN.02.02	Pemeliharaan Perangkat Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat intelijen.
	IN.02.03	Bank Data Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bank data intelijen.
<b>IN.03</b>	<b>Pemantauan Kegiatan Intelijen</b>	
	IN.03.00	Penanganan Tangkap Buron
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tangkap buron.
	IN.03.01	Penanganan <i>Digital Forensik</i>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan <i>digital forensik</i> .
<b>IN.04</b>	<b>Pengamanan Informasi Intelijen</b>	
	IN.04.00	Transmisi Berita Sandi
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan transmisi berita sandi.
	IN.04.01	Kontra Penginderaan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kontra penginderaan.
	IN.04.02	Kontra Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kontra intelijen.
	IN.04.03	Audit dan Pengujian Sistem Informasi
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit dan pengujian sistem informasi.
<b>IN.05</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi</b>	
	IN.05.00	Pengembangan Sumber Daya Manusia Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia intelijen.
	IN.05.01	Pengembangan Perangkat Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perangkat intelijen.
	IN.05.02	Pemeliharaan Perangkat Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat intelijen.
<b>IN.06</b>	<b>Pembinaan dan Bimbingan Teknis Intelijen</b>	
	IN.06.00	Pembinaan Intelijen

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan intelijen.
	IN.06.01	Bimbingan Teknis Intelijen
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis intelijen.
<b>IN.07</b>	<b>Rekomendasi/Keterangan Bebas dari Masalah Hukum</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rekomendasi/keterangan bebas dari masalah hukum.	
<b>IN.08</b>	<b>Perizinan Senjata</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan surat izin kepemilikan senjata, surat izin penggunaan senjata, dan surat izin membawa senjata.	
<b>PU</b>	<b>TINDAK PIDANA UMUM</b>	
<b>PU.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Umum</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan terkait Bidang Tindak Pidana Umum mulai dari penyiapan bahan, telaah, pemberian masukan dan pemberian dukungan, pengumpulan dan pengelolaan data, serta laporan.	
<b>PU.01</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda</b>	
	PU.01.00	Prapenuntutan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.
	PU.01.01	Praperadilan Tindak Pidana dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.
	PU.01.02	Penuntutan Tindak Pidana dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.
	PU.01.03	Eksekusi Tindak Pidana dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.
	PU.01.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.
	PU.01.05	Eksaminasi Tindak Pidana dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.
<b>PU.02</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum</b>	
	PU.02.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum.
	PU.02.01	Praperadilan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum.
	PU.02.02	Penuntutan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum.
	PU.02.03	Eksekusi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum.
	PU.02.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum.
	PU.02.05	Eksaminasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum.
<b>PU.03</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan</b>	
	PU.03.00	Eksekusi Tindak Pidana Ringan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana ringan.

	PU.03.01	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana ringan.
	PU.03.02	Eksaminasi Tindak Pidana Ringan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan.
<b>PU.04</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas</b>	
	PU.04.00	Eksekusi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
	PU.04.01	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
	PU.04.02	Eksaminasi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
<b>PU.05</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika</b>	
	PU.05.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana narkotika dan psikotropika.
	PU.05.01	Praperadilan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana narkotika dan psikotropika.
	PU.05.02	Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana narkotika dan psikotropika.
	PU.05.03	Eksekusi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana narkotika dan psikotropika.
	PU.05.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana narkotika dan psikotropika.
	PU.05.05	Eksaminasi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

<b>PU.06</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Kesehatan</b>	
	PU.06.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Kesehatan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana kesehatan.
	PU.06.01	Praperadilan Tindak Pidana Kesehatan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana kesehatan.
	PU.06.02	Penuntutan Tindak Pidana Kesehatan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana kesehatan.
PU.06.03	Eksekusi Tindak Pidana Kesehatan	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana kesehatan.	
PU.06.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana kesehatan.	
PU.06.05	Eksaminasi Tindak Pidana Kesehatan	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana kesehatan.	
<b>PU.07</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Keuangan</b>	
	PU.07.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Keuangan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana keuangan.
	PU.07.01	Praperadilan Tindak Pidana Keuangan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana keuangan.
	PU.07.02	Penuntutan Tindak Pidana Keuangan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana keuangan.
PU.07.03	Eksekusi Tindak Pidana Keuangan	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana keuangan.	
PU.07.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana keuangan.	
PU.07.05	Eksaminasi Tindak Pidana Keuangan	

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana keuangan.
<b>PU.08</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Siber</b>	
	PU.08.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Siber
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana siber.
	PU.08.01	Praperadilan Tindak Pidana Siber
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana siber.
	PU.08.02	Penuntutan Tindak Pidana Siber
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana siber.
	PU.08.03	Eksekusi Tindak Pidana Siber
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana siber.
PU.08.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana siber.	
PU.08.05	Eksaminasi Tindak Pidana Siber	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana siber.	
<b>PU.09</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam</b>	
	PU.09.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Sumber Daya Alam
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana sumber daya alam.
	PU.09.01	Praperadilan Tindak Pidana Sumber Daya Alam
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana sumber daya alam.
	PU.09.02	Penuntutan Tindak Pidana Sumber Daya Alam
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana sumber daya alam.
	PU.09.03	Eksekusi Tindak Pidana Sumber Daya Alam
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana sumber daya alam.
PU.09.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana sumber daya alam.	

	PU.09.05	Eksaminasi Tindak Pidana Sumber Daya Alam Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana sumber daya alam.
<b>PU.10</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme</b>	
	PU.10.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Terorisme Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana terorisme.
	PU.10.01	Praperadilan Tindak Pidana Terorisme Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana terorisme.
	PU.10.02	Penuntutan Tindak Pidana Terorisme Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana terorisme.
	PU.10.03	Eksekusi Tindak Pidana Terorisme Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana terorisme.
	PU.10.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana terorisme.
	PU.10.05	Eksaminasi Tindak Pidana Terorisme Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana terorisme.
<b>PU.11</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang</b>	
	PU.11.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana hak asasi manusia terhadap perempuan, anak dan perdagangan orang.
	PU.11.01	Praperadilan Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak, dan Perdagangan Orang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang.
	PU.11.02	Penuntutan Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak, dan Perdagangan Orang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang.
	PU.11.03	Eksekusi Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana terhadap perempuan, anak dan perdagangan orang.
	PU.11.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana terhadap perempuan, anak dan perdagangan orang.
	PU.11.05	Eksaminasi Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana terhadap perempuan, anak dan perdagangan orang.
<b>PU.12</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual</b>	
	PU.12.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana hak kekayaan intelektual.
	PU.12.01	Praperadilan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana hak kekayaan intelektual.
	PU.12.02	Penuntutan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana hak kekayaan intelektual.
	PU.12.03	Eksekusi Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana hak kekayaan intelektual.
	PU.12.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana hak kekayaan intelektual.
	PU.12.05	Eksaminasi Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana hak kekayaan intelektual.
<b>PU.13</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya</b>	
	PU.13.00	Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana umum lainnya.
	PU.13.01	Praperadilan Tindak Pidana Umum Lainnya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan tindak pidana umum lainnya.

	PU.13.02	Penuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana umum lainnya.
	PU.13.03	Eksekusi Tindak Pidana Umum Lainnya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi tindak pidana umum lainnya.
	PU.13.04	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tindak pidana umum lainnya.
	PU.13.05	Eksaminasi Tindak Pidana Umum Lainnya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana umum lainnya.
<b>PU.14</b>	<b>Penegakan Hukum Perkara yang Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.	
<b>PU.15</b>	<b>Rekomendasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rekomendasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti surat permohonan, nota pendapat, dan surat perintah.	
<b>KH</b>	<b>TINDAK PIDANA KHUSUS</b>	
<b>KH.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan terkait Bidang Tindak Pidana Khusus mulai dari penyiapan bahan, telaah, pemberian masukan dan pemberian dukungan, pengumpulan dan pengelolaan data, serta laporan.	
<b>KH.01</b>	<b>Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang</b>	
	KH.01.00	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Korupsi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan masyarakat tindak pidana korupsi.
	KH.01.01	Hasil Analisis terkait Tindak Pidana Korupsi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hasil analisis terkait tindak pidana korupsi dari PPATK.

	KH.01.02	Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana korupsi.
	KH.01.03	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.01.04	Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.01.05	Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan, gugatan, permohonan serta tindakan lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.01.06	Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
KH.01.07	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.	
KH.01.08	Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum biasa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti upaya hukum banding tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dan upaya hukum kasasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.	
KH.01.09	Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan eksekusi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.	
KH.01.10	Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dan upaya hukum peninjauan kembali tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.01.11	Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.01.12	Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
<b>KH.02</b>	<b>Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang</b>	
	KH.02.00	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Perpajakan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan masyarakat tindak pidana perpajakan.
	KH.02.01	Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain Terkait Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan, gugatan, permohonan serta tindakan lain terkait tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.02.02	Prapenuntutan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.02.03	Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang
	KH.02.04	Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum biasa tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang seperti upaya hukum banding tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, dan upaya hukum kasasi tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.02.05	Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan eksekusi tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.02.06	Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang seperti upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, dan upaya hukum peninjauan kembali tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.02.07	Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tindak pidana perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.02.08	Eksaminasi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
<b>KH.03</b>	<b>KH.03</b>	<b>Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang</b>
	KH.03.00	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan masyarakat tindak pidana kepabeanan dan cukai.
	KH.03.01	Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain terkait Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan, gugatan, permohonan serta tindakan lain terkait tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.02	Prapenuntutan Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.03	Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.04	Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum biasa tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang seperti upaya hukum banding tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang, dan upaya hukum kasasi tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.05	Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan eksekusi tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.06	Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang seperti upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang dan upaya hukum peninjauan kembali tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.07	Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tindak pidana kepebeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang.
	KH.03.08	Eksaminasi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang.
<b>KH.04</b>	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat</b>	
	KH.04.00	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan masyarakat tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.01	Prapenyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenyidikan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.02	Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.03	Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan, gugatan, permohonan serta tindakan lain tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.04	Prapenuntutan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.05	Penuntutan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.06	Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum biasa tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat seperti upaya hukum banding tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, dan upaya hukum kasasi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.07	Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan eksekusi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.08	Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat seperti upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, dan upaya hukum peninjauan kembali tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.09	Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
	KH.04.10	Eksaminasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat.
<b>KH.05</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> dan evaluasi.

<b>DT</b>	<b>PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA</b>	
<b>DT.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara</b>	
	Perumusan kebijakan terkait Bidang Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara mulai dari penyiapan bahan, telaah, pemberian masukan dan pemberian dukungan, pengumpulan dan pengelolaan data, serta laporan.	
<b>DT.01</b>	<b>Penanganan Perkara Perdata</b>	
DT.01.00	Bantuan Hukum Penyelamatan Perkara Perdata	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum penyelamatan perkara perdata.	
DT.01.01	Bantuan Hukum Pemulihan Perkara Perdata	
	Arsip Atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum pemulihan perkara perdata.	
DT.01.02	Bantuan Hukum Arbitrase	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum arbitrase.	
DT.01.03	Penegakan Hukum Perkara Perdata	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum perkara perdata.	
<b>DT.02</b>	<b>Penanganan Perkara Tata Usaha Negara</b>	
DT.02.00	Bantuan Hukum Tata Usaha Negara	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum tata usaha negara.	
DT.02.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Tata Usaha Negara	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tata usaha negara.	
DT.02.02	Bantuan Hukum Uji Materiil Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi)	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum uji materiil tata usaha negara (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi)	
DT.02.03	Pelayanan Hukum Tata Usaha Negara	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan hukum tata usaha negara.	
<b>DT.03</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>	
DT.03.00	Pendapat Hukum	

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pendapat hukum.
	DT.03.01	Pendampingan dan Audit Hukum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan audit hukum.
	DT.03.02	Tindakan Hukum Lain (Fasilitasi, Mediasi, dan Konsiliasi) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tindakan hukum lain (fasilitasi, mediasi, dan konsiliasi).
	DT.03.03	Pelayanan Hukum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan hukum.
<b>PM</b>	<b>PIDANA MILITER</b>	
<b>PM.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Pidana Militer</b>	
	Perumusan kebijakan terkait Bidang Pidana Militer mulai dari penyiapan bahan, telaah, pemberian masukan dan pemberian dukungan, pengumpulan dan pengelolaan data, serta laporan.	
<b>PM.01</b>	<b>Penindakan Pidana Militer</b>	
	PM.01.00	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Pidana Militer Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan masyarakat pidana militer.
	PM.01.01	Hasil Analisis PPATK terkait Pidana Militer Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hasil analisis PPATK terkait pidana militer.
	PM.01.02	Penyidikan Perkara Koneksitas Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan perkara koneksitas.
	PM.01.03	Penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, perkara pencucian uang dan perkara lainnya di Bidang Pidana Militer. Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, perkara pencucian uang dan perkara lainnya di Bidang Pidana Militer.
	PM.01.04	Koordinasi Perkara Koneksitas Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi perkara koneksitas.
	PM.01.05	Koordinasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Perkara Lainnya di Pidana Militer

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan perkara lainnya di Bidang Pidana Militer.
<b>PM.02</b>	<b>Penuntutan</b>	
	PM.02.00	Prapenuntutan, Pemeriksaan Tambahan, Pemberian Pendapat Hukum kepada Perwira Penyerah Perkara, Penyerahan Perkara, Penutupan Perkara, dan Penghentian Penuntutan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, dan penghentian penuntutan.
	PM.02.01	Praperadilan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan praperadilan pidana militer.
	PM.02.02	Penuntutan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan pidana militer.
	PM.02.03	Perlawanan, Upaya Hukum Biasa, dan Pelaksanaan Penetapan Hakim Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim terhadap pidana militer.
	PM.02.04	Koordinasi Teknis Penuntutan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi teknis penuntutan.
<b>PM.03</b>	<b>Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi</b>	
	PM.03.00	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan pidana militer.
	PM.03.01	Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Penyelesaian Barang Rampasan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, dan penyelesaian barang rampasan pidana militer.
	PM.03.02	Pengawasan Terhadap Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan, dan Keputusan Lepas Bersyarat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat pidana militer.
	PM.03.03	Permohonan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Upaya Hukum Luar Biasa Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan upaya hukum luar biasa pidana militer.

	PM.03.04	Eksaminasi Perkara Koneksitas dan Perkara Tindak Pidana yang Penuntutannya Dilakukan oleh Oditurat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.
	PM.03.05	Pengelolaan Barang Bukti Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti pidana militer.
	<b>PM.04</b>	<b>Pengamanan dan Pengawasan Penanganan Perkara</b>
	PM.04.00	Koordinasi dan Kerja Sama Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan kerja sama terkait pengamanan dan pengawasan penanganan perkara.
	PM.04.01	Pengamanan dan Pengawasan Tahanan dan Terpidana Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan tahanan dan terpidana.
<b>PA</b>	<b>PEMULIHAN ASET</b>	
	<b>PA.00</b>	<b>Penelusuran Aset</b>
	PA.00.00	Penelusuran Aset Nasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelusuran aset nasional seperti nota pendapat penelusuran, surat perintah induk, surat perintah giat, surat kepada instansi terkait, dan laporan kegiatan.
	PA.00.01	Penelusuran Aset Transnasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelusuran aset transnasional.
	<b>PA.01</b>	<b>Perampasan Aset</b>
	PA.01.00	Perampasan Aset Nasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perampasan aset nasional.
	PA.01.01	Perampasan Aset Transnasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perampasan aset transnasional.
	<b>PA.02</b>	<b>Pengamanan Aset</b>
	PA.02.00	Pengamanan Aset Nasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan aset nasional seperti surat permohonan blokir.

	PA.02.01	Pengamanan Aset Transnasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan aset transnasional.	
<b>PA.03</b>	<b>Pemeliharaan Aset</b>		
	PA.03.00	Pemeliharaan Aset Nasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan aset nasional.	
	PA.03.01	Pemeliharaan Aset Transnasional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan aset transnasional.	
<b>PA.04</b>	<b>Pengembalian Aset</b>		
	PA.04.00	Lelang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembalian aset melalui lelang mulai dari keputusan lelang, keputusan panitia lelang, surat permohonan lelang, surat perintah pejabat penjual, surat pertanggungjawaban mutlak, surat keterangan sisa uang pengganti, dan penetapan limit.	
		PA.04.01	Hibah Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembalian aset melalui hibah.
	PA.04.02	Penetapan Status Penggunaan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan aset.	
<b>PS</b>	<b>PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM</b>		
	<b>PS.00</b>	<b>Analisis Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia</b>	
		PS.00.00	Penerbitan Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan politik hukum, pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia.
			PS.00.01
PS.00.02		Seminar Ilmiah Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Seminar Ilmiah, <i>Focus Group Discussion</i> .	

<b>PS.01</b>	<b>Open Journal System (OJS)/Jurnal Bina Adhyaksa</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>Open Journal System (OJS)/Jurnal Bina Adhyaksa</i> seperti penetapan publikasi jurnal adhyaksa.	
<b>PS.02</b>	<b>Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Intelijen, Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara</b>	
	PS.02.00	Penerbitan Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan penegakan hukum, intelijen, pidana, dan perdata dan tata usaha negara.
	PS.02.01	<i>Policy Brief</i> dan <i>Policy Paper</i>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penilaian karya tulis ilmiah (makalah) sampai penetapan hasil karya ilmiah/tugas ilmiah.
PS.02.02	Pengelolaan e-analisis	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan e-analisis.	

B. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

<b>PR</b>	<b>PERENCANAAN</b>	
	<b>PR.00</b>	<b>Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan</b>
	PR.00.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ <i>Master Plan</i>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan RPJP/ <i>Master Plan</i> .
	PR.00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.
	PR.00.02	Rencana Strategis (Renstra)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Renstra.
	PR.00.03	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Musrenbang.
	<b>PR.01</b>	<b>Rencana Kerja</b>
	PR.01.00	Usulan Kegiatan Unit Kerja beserta Data Pendukung
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usulan program kerja dari unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, seperti usulan program unit kerja ( <i>Term of Reference (TOR)</i> ) kegiatan termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari unit kerja).
	PR.01.01	Rencana Kerja Tahunan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia.
PR.01.02	Rencana Kerja Berdasar Pagu Indikatif	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana kerja berdasarkan pagu indikatif, sejak penyusunan pagu indikatif sampai penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Republik Indonesia.	
PR.01.03	Inisiatif Baru	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif baru Kejaksaan Republik Indonesia.	

<b>PR.02</b>	<b>Penetapan/Kontrak/Perjanjian Kinerja</b>	
	PR.02.00	Jaksa Agung
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kerja Jaksa Agung, seperti penetapan kinerja Jaksa Agung.
	PR.02.01	Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kerja pimpinan unit kerja/satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
	PR.02.02	Eselon III/Eselon IV/Staf/Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kerja Eselon III/Eselon IV/Staf/Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.		
<b>PR.03</b>	<b>Perencanaan Anggaran</b>	
	PR.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)/Kerangka Acuan Kerja (KAK))
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran termasuk seluruh dokumen penyusunan RKAKL pagu anggaran, penyusunan RKAKL pagu alokasi anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Murni dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal.
	PR.03.01	Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan PNBP.
	PR.03.02	Penetapan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan anggaran (DIPA/POK).		
<b>PR.04</b>	<b>Revisi Anggaran</b>	
	PR.04.00	Revisi DIPA dan POK
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Revisi DIPA dan POK, baik revisi anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Anggaran, maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
PR.04.01	Anggaran Biaya Tambahan (ABT)	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ABT.

	PR.04.02	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
<b>PR.05</b>	<b>Laporan</b>	
	PR.05.00	Laporan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semester) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan unit organisasi, dan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.
	PR.05.01	Laporan Tahunan Unit Kerja Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan tahunan unit kerja.
	PR.05.02	Laporan Tahunan Lembaga Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.
	PR.05.03	Laporan Khusus Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan khusus.
	PR.05.04	Laporan Perkembangan Tahapan Kegiatan / <i>Progress Report</i> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).
	PR.05.05	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN)/Laporan Kinerja (LKJ) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja (LKJ).
<b>PR.06</b>	<b>Evaluasi Program</b>	
	PR.06.00	Evaluasi Program Unit Kerja Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi program unit organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
	PR.06.01	Evaluasi Program Lembaga Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi program Kejaksaan Republik Indonesia.

<b>KE</b>	<b>KERJA SAMA</b>	
	<b>KE.00</b>	<b>Kerja Sama Dalam Negeri</b>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/kontrak/perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, risalah pembuatan MoU/kontrak/perjanjian kerja sama dalam negeri, rancangan/draf awal, rancangan/draf akhir, memori perjanjian, dan naskah asli yang ditandatangani.
	<b>KE.01</b>	<b>Kerja Sama Internasional</b>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama internasional mulai dari telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, risalah pembuatan MoU/kontrak/perjanjian kerja sama internasional, rancangan/draf awal, rancangan/draf akhir, memori perjanjian, dan naskah asli yang ditandatangani.
<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>	
	<b>HK.00</b>	<b>Program Legislasi</b>
	HK.00.01	Bahan/Materi Program Legislasi Nasional
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan program legislasi Kejaksaan Republik Indonesia termasuk bahan/materi program legislasi nasional.
	HK.00.02	Program Legislasi Instansi
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan program legislasi Kejaksaan Republik Indonesia termasuk bahan/materi program legislasi instansi mulai dari inventarisasi peraturan instansi, undangan, daftar hadir, dan laporan.	
<b>HK.01</b>	<b>Produk Hukum</b>	
HK.01.00	Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang-undangan, instruksi, surat edaran, mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengoordinasian, perumusan dan pembahasan sampai dengan pengesahannya.	

	HK.01.01	Produk Hukum yang Bersifat Penetapan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksana kegiatan.
<b>HK.02</b>	<b>Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (NSPK)</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (NSPK) seperti naskah akademik, penyusunan draf awal, penyusunan draf akhir, dan penetapan pedoman/standar/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan prosedur tetap.	
<b>HK.03</b>	<b>Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum yang diterima dari lembaga/instansi terkait seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan-peraturan lain yang dijadikan referensi.	
<b>HK.04</b>	<b>Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi dan Pembinaan Hukum</b>	
	HK.04.00	Sosialisasi/Diseminasi Hukum
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi/diseminasi hukum.
	HK.04.01	Penyebarluasan Produk dan Informasi Hukum
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyebarluasan produk dan informasi hukum.
	HK.04.02	Penerangan dan Penyuluhan Hukum
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerangan dan penyuluhan hukum.
<b>HK.05</b>	<b>Pertimbangan/Telaah Hukum/<i>Judicial Review</i> Peraturan Perundang-undangan</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pertimbangan/telaah hukum/ <i>judicial review</i> peraturan perundang-undangan seperti permintaan pertimbangan/telaah dan hasil pertimbangan/telaah.	
<b>HK.06</b>	<b>Terjemahan Peraturan Perundang-undangan</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan terjemahan peraturan perundang-undangan seperti bahan terjemahan, undangan, daftar hadir, dan hasil terjemahan yang sudah ditandatangani oleh kementerian yang membidangi peraturan perundang-undangan, hasil terjemahan.	
<b>HK.07</b>	<b>Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana antar Negara</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pemindahan narapidana antar negara termasuk berkas perkara, surat pertimbangan presiden, dan putusan pengadilan.	

<b>HM</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	
<b>HM.00</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan</b>	
HM.00.00	Brosur/ <i>Leaflet</i> /Poster	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat melalui brosur/ <i>leaflet</i> /poster.
HM.00.01	Pengumuman	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyajian informasi melalui pengumuman.
HM.00.02	Pemberitaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyajian informasi melalui pemberitaan.
HM.00.03	Kliping Koran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kejaksaan Republik Indonesia melalui kliping koran.
<b>HM.01</b>	<b>Hubungan ANTAR Lembaga</b>	
HM.01.00	Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).
HM.01.01	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk magang, PSG/PKL.
HM.01.02	Hubungan dengan Forum Kehumasan/Badan Koordinasi Kehumasan/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia.	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan forum kehumasan/Bakohumas/Perhumas).
HM.01.03	Hubungan dengan Media Massa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hubungan dengan media massa seperti siaran pers/konferensi pers/ <i>press release</i> , kunjungan wartawan/peliputan, media visit, dan wawancara.

	HM.01.04	Siaran Pers/Konferensi Pers/ <i>Press Realease</i> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hubungan dengan siaran pers/konferensi pers/ <i>press realease</i> .
	HM.01.05	Penerimaan Laporan Pengaduan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan laporan pengaduan masyarakat.
	HM.01.06	Survei Kepuasan Masyarakat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan survey kepuasan masyarakat.
<b>HM.02</b>	<b>Hearing/Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan RDP dengan DPR seperti surat undangan dari DPR, bahan/materi RDP, dan laporan/hasil RDP.	
<b>HM.03</b>	<b>Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kabinet</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, dan kabinet.	
<b>HM.04</b>	<b>Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Pimpinan atau Acara Kelembagaan</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan atau acara kelembagaan meliputi acara kedinasan, dan peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media seperti kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia.	
<b>HM.05</b>	<b>Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari perencanaan sampai penyebaran.	
<b>HM.06</b>	<b>Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan publikasi melalui media massa cetak maupun elektronik.	
<b>HM.07</b>	<b>Pameran, Sayembara dan Festival</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pameran, sayembara, lomba, festival, dan pembuatan spanduk dan iklan.	
<b>HM.08</b>	<b>Penghargaan dan Tanda Kenang-kenangan</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dan tanda kenang-kenangan.	
<b>HM.09</b>	<b>Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, dan Permohonan Maaf</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf.	

HM.10	<p><b>Layanan Informasi Publik (LIP)/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</b></p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mulai dari prosedur layanan informasi publik, laporan layanan informasi publik, dan aspirasi publik.</p>
<b>OT</b>	<b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>
<b>OT.00</b>	<b>Organisasi</b>
OT.00.00	<p>Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, tugas pokok dan fungsi organisasi mulai dari analisis organisasi, pembentukan, perubahan, dan pembubaran.</p>
OT.00.01	<p>Evaluasi Organisasi</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi organisasi.</p>
<b>OT.01</b>	<b>Tata Laksana</b>
OT.01.00	<p>Sistem dan Prosedur Kerja</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan standar prosedur operasional/standar operasional prosedur/prosedur tetap.</p>
OT.01.01	<p>Kajian/Analisis Jabatan/Analisis Manajemen serta Penyuluhan Ketatalaksanaan</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kajian/analisis organisasi, jabatan, beban jabatan, uraian jabatan, kelas jabatan, peta jabatan, dan evaluasi jabatan serta penyuluhan ketatalaksanaan.</p>
OT.01.02	<p>Standar Kompetensi Jabatan</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional.</p>
<b>OT.02</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>
OT.02.00	<p>Implementasi Reformasi Birokrasi</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi.</p>
OT.02.01	<p><i>Monitoring</i> dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi reformasi birokrasi.</p>

		OT.02.02	Penilaian Reformasi Birokrasi
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi.
<b>KP</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
	<b>KP.00</b>	<b>Formasi Pegawai</b>	
		KP.00.00	Usulan dari Unit Kerja
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan permintaan usulan formasi dari unit kerja (surat usulan formasi unit kerja dan lampiran, analisis jabatan dan analisis beban kerja).
		KP.00.01	Usulan Permintaan Formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB)
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan permintaan usulan formasi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia seperti surat usulan formasi Kejaksaan Republik Indonesia dan lampiran.
		KP.00.02	Persetujuan Formasi dari Kemenpan dan RB
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberian persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (surat persetujuan formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB).
		KP.00.03	Penetapan Formasi
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penetapan formasi (usulan dan keputusan penetapan formasi).
		KP.00.04	Penetapan Formasi Khusus
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penetapan formasi khusus (usulan dan keputusan penetapan formasi khusus).
		<b>KP.01</b>	<b>Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>
		KP.01.00	Proses Penerimaan ASN dan atau PNS
			Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penerimaan ASN dan atau PNS mulai dari pengumuman hingga keputusan kelulusan.
		KP.01.01	Sanggahan Proses Seleksi, Pengumuman Kelulusan, dan Kelengkapan Berkas

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sanggahan dalam proses penerimaan PNS, seperti sanggahan pada proses seleksi, sanggahan terhadap pengumuman kelulusan, dan sanggahan terhadap kelengkapan berkas.
	KP.01.02	Penetapan Pengumuman Kelulusan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan pengumuman kelulusan.
	KP.01.03	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.
	KP.01.04	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan nota usul dan kelengkapan penetapan NIP mulai dari kelengkapan surat lamaran, ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kartu kuning, surat keterangan dokter, dan surat keterangan lain yang disesuaikan.
	KP.01.05	Nota Usul dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Menjadi PNS Lebih 2 Tahun Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun.
	KP.01.06	Keputusan CPNS/PNS Kolektif Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan Keputusan CPNS/PNS kolektif.
<b>KP.02</b>	<b>Pengadaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K)/Pegawai Kontrak</b>	
	KP.02.00	Proses Penerimaan ASN P3K Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penerimaan ASN P3K mulai dari pengumuman penerimaan ASN P3K, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang keputusan hasil ujian, dan wawancara.
	KP.02.01	Penetapan Pengumuman Kelulusan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan pengumuman kelulusan.
	KP.02.02	Pengangkatan ASN P3K Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pengangkatan ASN P3K mulai dari surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning, surat keterangan dokter, dan surat keterangan lain yang disesuaikan
	KP.02.03	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.
	KP.02.04	Keputusan/Perjanjian Kerja

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Keputusan/Perjanjian Kerja ASN P3K.
<b>KP.03</b>	<b>Pengadaan Pegawai Non ASN/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)</b>	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pegawai non ASN/PPNPN seperti berkas lamaran dan keputusan penetapan.
<b>KP.04</b>	<b>Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama</b>	
	KP.04.00	Proses Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penerimaan jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama sejak pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, <i>assessment center</i> , kompetensi bidang, dan keputusan hasil ujian dan wawancara.
	KP.04.01	Penetapan Pengumuman Kelulusan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan pengumuman kelulusan.
	KP.04.02	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.
	KP.04.03	Usul Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses usul rekomendasi KASN.
	KP.04.04	Nota Usul ke Presiden
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan nota usul ke presiden.
<b>KP.05</b>	<b>Pembinaan/Pengembangan Karier Pegawai</b>	
	KP.05.00	Izin Belajar/Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Kursus/Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan izin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/ujian penyesuaian kenaikan pangkat mulai dari surat edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut, surat menyurat permohonan dari pegawai dan/atau usulan studi, laporan hasil tes masuk yang dituju, ikatan kerja dan surat perjanjian izin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/keputusan/surat izin, laporan perkembangan studi, ijazah, akreditasi program studi, dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/sertifikat.
	KP.05.01	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penilaian kinerja pegawai/SKP
	KP.05.02	Pakta Integritas/Kesetiaan pada Ideologi Pancasila

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan pakta integritas/kesetiaan pada ideologi Pancasila.
	KP.05.03	Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan PAK jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia seperti daftar usul PAK dan PAK.
	KP.05.04	Disiplin Pegawai Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan disiplin pegawai seperti daftar hadir pegawai, rekapitulasi kehadiran dan izin pegawai.
	KP.05.05	Pelaksanaan Keputusan Hukuman Disiplin Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian hukuman disiplin.
	KP.05.06	Majelis Kehormatan Jaksa Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Jaksa.
	KP.05.07	<i>Clearance</i> /Surat Keterangan Kepegawaian Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>clearance</i> untuk keperluan mutasi, kenaikan jabatan/pangkat, diklat dan/atau ke luar negeri.
	KP.05.08	Penghargaan dan Tanda Jasa/Satya Lencana Karya Satya (10, 20, dan 30) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa/Satya Lencana Karya Satya seperti administrasi, keputusan penetapan, dan sertifikat/piagam.
<b>KP.06</b>	<b>Mutasi Pegawai</b>	
	KP.06.00	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Pindah Sementara, Mutasi antar Unit, dan Penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Dikaryakan. Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, pindah sementara, mutasi antar unit, dan penugasan TNI yang dikaryakan seperti surat permohonan, surat alih tugas/perpindahan, surat keputusan, surat tugas, dan nota persetujuan/pertimbangan KASN.
	KP.06.01	Mutasi Keluarga Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses status mutasi keluarga seperti surat izin pernikahan/perceraian, surat penolakan izin, surat nikah/cerai, akte kelahiran anak, surat keterangan adopsi anak, dan surat keterangan meninggal dunia.

	KP.06.02	Kenaikan Pangkat/Golongan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses usulan kenaikan pangkat/golongan mulai dari nota usul kenaikan pangkat/golongan, sertifikat lulus uji kompetensi, nota persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan keputusan kenaikan pangkat/golongan.
	KP.06.03	Kenaikan Gaji Berkala
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses usulan kenaikan gaji berkala dan keputusan kenaikan gaji berkala.
	KP.06.04	Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan seperti usulan dan keputusan kenaikan jabatan, usulan dan keputusan pengangkatan jabatan, serta usulan dan keputusan pemberhentian jabatan.
	KP.06.05	Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai yang Melakukan Tindak Pidana
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan usulan penetapan perubahan data dasar/status/ kedudukan hukum pegawai mulai dari usulan, nota persetujuan, keputusan, dan surat persetujuan.		
KP.06.06	Peninjauan Masa Kerja	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peninjauan masa kerja bagi PNS yang telah memiliki pengalaman kerja selama menjadi PNS, pejabat negara, selama menjalankan tugas pemerintahan (lokal staf pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perangkat desa, pegawai badan-badan internasional, atau petugas pada pemerintahan lain yang dibebankan APBN), selama menjalankan kewajiban membela negara, dan selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)).	
KP.06.07	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)/Tim Penilai Kinerja	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh BAPERJAKAT/tim penilai kinerja seperti administrasi dan notula.	
<b>KP.07</b>	<b>Administrasi Pegawai</b>	
	KP.07.00	Cuti Besar
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan dan persetujuan cuti besar.		

	KP.07.01	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti Tahunan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan dan persetujuan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan.
	KP.07.02	Cuti Alasan Penting Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan dan persetujuan cuti alasan penting.
	KP.07.03	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan dan persetujuan CLTN
	KP.07.04	Dokumentasi Identitas Pegawai Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen identitas pegawai seperti usul penetapan Kartu Pegawai (Karpeg)/Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)/Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), Laporan Harta Kekayaan ASN, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)/Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)
	KP.07.05	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan DUK
<b>KP.08</b>	<b>Kesejahteraan Pegawai</b>	
	KP.08.00	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian usulan pemeliharaan kesehatan pegawai.
	KP.08.01	Asuransi Pegawai/Asuransi Kesehatan (ASKES)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan.
	KP.08.02	Bantuan Sosial Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan sosial.
	KP.08.03	Rekreasi, Olah Raga, dan Kesenian Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/proses pelaksanaan rekreasi, olahraga, dan kesenian.
	KP.08.04	Organisasi Non Kedinasan Pegawai Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi kedinasan pegawai seperti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan, Yayasan Tridaya, Keluarga Besar Purna Adhyaksa, <i>International Association of Prosecutors</i> , dan organisasi non kedinasan lainnya.

<b>KP.09</b>	<b>Perselisihan/Sengketa Kepegawaian</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/proses penyelesaian perselisihan/sengketa pegawai mulai dari pengaduan, laporan, notula, berita acara pemeriksaan, dan keputusan.	
<b>KP.10</b>	<b>Pemberhentian Pegawai</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberhentian dengan hormat/ tidak hormat mulai dari usulan pemberhentian pegawai dan penetapan pemberhentian pegawai.	
<b>KP.11</b>	<b>Pemberhentian karena Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberhentian PNS karena pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas mulai dari usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas, Keputusan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas, dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas.	
<b>KP.12</b>	<b>Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai mulai dari lamaran diterima sampai dengan pensiun.	
<b>KP.13</b>	<b>Berkas Perseorangan Pejabat Eselon I</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas perseorangan pejabat eselon I mulai dari lamaran diterima sampai dengan pensiun.	
<b>KP.14</b>	<b>Berkas Perseorangan Pegawai P3K/Non ASN</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai P3K/Non ASN mulai dari lamaran diterima sampai dengan pensiun.	
<b>KP.15</b>	<b>Berkas Perseorangan Pegawai TNI yang Dikaryakan</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai TNI yang dikaryakan mulai dari lamaran diterima sampai dengan pensiun.	
<b>DL</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
	<b>DL.00</b>	<b>Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</b>
		DL.00.00

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisis kebutuhan diklat termasuk usulan kebutuhan diklat, perencanaan anggaran diklat, kebutuhan tenaga pengajar/widyaiswara, sasaran/target peserta, sistem/metode diklat, dan laporan analisis kebutuhan diklat.
	DL.00.01	Program Kediklatan Tahunan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan program kediklatan tahunan atau kalender diklat.
	DL.00.02	Kurikulum dan Silabus Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum dan silabus diklat, seperti Keputusan Tim Penyusunan Kurikulum/silabus, notula rapat Tim Penyusun Kurikulum, rancangan kurikulum, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), panduan pengajaran, penetapan kurikulum, evaluasi kurikulum/silabus, dan laporan hasil evaluasi kurikulum/silabus.
	DL.00.03	Modul/Materi/Bahan Ajar Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan modul/bahan ajar diklat seperti Keputusan Tim Penyusunan modul/materi/bahan ajar, notula rapat tim penyusun modul/materi/bahan ajar, rancangan modul/materi/bahan ajar, penetapan modul/materi/bahan ajar, evaluasi modul/materi/bahan ajar, dan laporan hasil evaluasi modul/materi/bahan ajar.
	DL.00.04	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan diklat seperti surat permohonan koordinasi, surat jawaban permohonan koordinasi, dan laporan hasil koordinasi.
<b>DL.01</b>	<b>Penyelenggaraan Diklat</b>	
	DL.01.00	Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan diklat manajemen dan kepemimpinan seperti surat pemanggilan peserta, Keputusan Tim Penyelenggara, Keputusan Tim Pengajar, panduan diklat, sambutan pembukaan penyelenggara diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, <i>pretest/posttest</i> , hasil nilai peserta diklat, sambutan penutup dan laporan/tugas akhir diklat.
	DL.01.01	Diklat Fungsional

		Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Keputusan Tim Penyelenggara, Keputusan Tim Pengajar, panduan diklat, sambutan pembukaan penyelenggara diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, <i>pretest/posttest</i> , hasil nilai peserta diklat, sambutan penutup, dan laporan/tugas akhir diklat.
	DL.01.02	Diklat Teknis Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan diklat teknis seperti surat pemanggilan peserta, Keputusan Tim Penyelenggara, Keputusan Tim Pengajar, panduan diklat, sambutan pembukaan penyelenggara diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, <i>pretest/posttest</i> , hasil nilai peserta diklat, sambutan penutup, dan laporan/tugas akhir diklat.
	DL.01.03	Diklat Kerja Sama Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan diklat yang dilakukan melalui kerja sama seperti surat permohonan kerja sama, perjanjian kerja sama, penugasan narasumber/widyaiswara, jadwal, Keputusan Tim Pelaksana, <i>pretest/posttest</i> , dan hasil nilai peserta diklat.
<b>DL.02</b>	<b>Evaluasi Diklat</b>	
	DL.02.00	Evaluasi Penyelenggara Diklat Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat seperti isian formulir evaluasi penyelenggara dan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat.
	DL.02.01	Evaluasi Widyaiswara Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi widyaiswara seperti isian formulir evaluasi widyaiswara dan laporan evaluasi widyaiswara.
	DL.02.02	Evaluasi Peserta/Alumni Diklat Arsip atau rekaman kegiatan berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta/alumni diklat seperti isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat dan evaluasi alumni peserta pasca diklat.
<b>DL.03</b>	<b>Akreditasi Lembaga Diklat</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi lembaga diklat mulai dari surat permohonan, berita acara tim penilai, surat keputusan penetapan akreditasi, sertifikat akreditasi sampai dengan laporan akreditasi lembaga diklat.	
<b>DL.04</b>	<b>Data Penyelenggaraan Diklat</b>	
	DL.04.00	Data Lembaga Penyelenggara Kerja Sama Diklat

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data lembaga penyelenggara kerja sama diklat.
	DL.04.01	Data Prasarana Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data prasarana diklat.
	DL.04.02	Data Sarana Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data sarana diklat.
	DL.04.03	Data Pengelola Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data pengelola diklat.
	DL.04.04	Data Penyelenggaraan Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data penyelenggaraan diklat.
	DL.04.05	Data Widyaiswara Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data widyaiswara.
	DL.04.06	Data Program Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data program diklat.
	DL.04.07	Data Peserta Diklat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data peserta diklat seperti surat permohonan nomor register, buku register, dan surat penyampaian kode register.
	DL.04.08	Salinan STTPL/Sertifikat Kelulusan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan salinan STTPL/Sertifikat kelulusan.
	<b>DL.05</b>	<b>Pendidikan Formal S2/S3</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan formal S2/S3 mulai dari MoU dengan universitas, pengumuman, seleksi, penetapan kelulusan penerima beasiswa, salinan ijazah, dan laporan kegiatan.
<b>KU</b>	<b>KEUANGAN</b>	
	<b>KU.00</b>	<b>Pelaksanaan Anggaran</b>
	KU.00.00	Rencana Anggaran Biaya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana anggaran biaya.
	KU.00.01	Belanja Pegawai

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan belanja pegawai seperti penggajian pegawai, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, dan lain-lain.
	KU.00.02	Pengeluaran Belanja Barang Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran belanja barang seperti belanja alat tulis kantor, dan lain-lain.
	KU.00.03	Belanja Barang Inventaris/Barang Modal Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang inventaris/barang modal seperti pembelian kendaraan dinas, bangunan, dan lain-lain.
<b>KU.01</b>	<b>Pengelolaan Perbendaharaan</b>	
	KU.01.00	Perbendaharaan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perbendaharaan seperti Keputusan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Keputusan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Keputusan pengangkatan pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Keputusan pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.
	KU.01.01	Pajak Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pajak seperti Surat Setoran Pajak (SSP), nota konfirmasi dan Surat Keterangan Pajak lainnya.
	KU.01.02	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan PNBP.
	KU.01.03	Pengembalian Belanja Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembalian belanja seperti Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
	KU.01.04	Pembukuan Anggaran Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembukuan anggaran seperti Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), Kartu Realisasi Anggaran dan Kartu Pengawasan.
<b>KU.02</b>	<b>Verifikasi Anggaran</b>	
	Arsip atau rekaman yang berkaitan dengan verifikasi anggaran.	

<b>KU.03</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan</b>	
	KU.03.00	Dokumen Akuntansi Keuangan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen akuntansi keuangan seperti berita acara pemeriksaan kas dan kas/register penutupan kas.
	KU.03.01	Laporan Keuangan Tahunan
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan seperti laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).		
<b>KU.04</b>	<b>Ketatausahaan Keuangan</b>	
	KU.04.00	Keterangan Penghasilan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterangan penghasilan.
	KU.04.01	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran.
	KU.04.02	Pinjaman
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman.
	KU.04.03	Tabungan Perumahan (TAPERUM)
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran TAPERUM.		
KU.04.04	Iuran Keanggotaan Organisasi	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran iuran keanggotaan organisasi.	
<b>KU.05</b>	<b>Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pendanaan dari bantuan/hibah/pinjaman luar negeri seperti permohonan pinjaman luar negeri ( <i>Blue Book</i> ), dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai ( <i>Grey Book</i> ), MoU dan dokumen sejenisnya, alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri.	
<b>KU.06</b>	<b>Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</b>	
	KU.06.00	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan SAI seperti BAR.
	KU.06.01	Register Transaksi Harian (RTH)
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan SAI seperti RTH.		

	KU.06.02	Laporan Realisasi SAI Bulanan/Triwulan/Semester Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan SAI seperti laporan realisasi SAI bulanan/triwulan/semester.
<b>KU.07</b>	<b>Pertanggungjawaban Keuangan Negara</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian keuangan negara seperti Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).	
<b>PL</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>	
<b>PL.00</b>	<b>Rencana Pengadaan (Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi)</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana pengadaan seperti pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi mulai dari hasil identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, KAK, surat penetapan rencana anggaran pengadaan dan pengumuman rencana umum pengadaan.	
<b>PL.01</b>	<b>Pemilihan Penyedia</b>	
	PL.01.00	Persiapan Pemilihan Penyedia
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari hasil identifikasi/pemeriksaan data pengadaan barang/jasa, penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis, penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan penyusunan dokumen pengadaan.
	PL.01.01	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan langsung seperti berkas pengajuan dari unit kerja pengusul ke PPK meliputi nota dinas, spesifikasi teknis, RAB, POK, surat pesanan, surat jalan, faktur/ <i>invoice</i> , undangan pengadaan langsung, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP), resume kontrak, kuitansi, surat setoran pajak, dan e-faktur.
	PL.01.02	<i>e-Purchasing</i> dan <i>e-Catalog</i>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa melalui <i>e-Purchasing</i> , <i>e-Catalog</i> seperti berkas pengajuan dari pengusul ke PPK meliputi nota dinas, spesifikasi teknis, RAB, POK, surat pesanan, surat jalan, faktur/ <i>invoice</i> , undangan pengadaan langsung, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, SPK, BAST, BAP, resume kontrak, kuitansi, surat setoran pajak, dan e-faktur.

	PL.01.03	Pelaksanaan Kontrak Tender/Penunjukan Langsung Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tender/penunjukan langsung mulai dari pengumuman sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
	PL.01.04	Swakelola Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa melalui swakelola mulai dari pengumuman sampai dengan laporan evaluasi.
<b>PL.02</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</b>	
	PL.02.00	Penatausahaan BMN Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN seperti laporan pencatatan BMN, pencatatan barang masuk, daftar barang BMN, dan pembukuan BMN.
	PL.02.01	Inventarisasi BMN Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi BMN seperti <i>stock opname</i> , dan daftar inventaris barang.
	PL.02.02	Pendistribusian BMN Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian BMN seperti catatan/bukti barang masuk/keluar dan catatan/bukti pendistribusian barang.
	PL.02.03	Penetapan Status Penggunaan BMN Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan BMN seperti usulan penggunaan BMN dan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang.
	PL.02.04	Pemeliharaan BMN Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan BMN seperti usulan pemeliharaan dan laporan pemeliharaan.
	PL.02.05	Pemanfaatan BMN Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN seperti permintaan/usulan pemanfaatan barang/BMN, perjanjian pemanfaatan BMN, penolakan pemanfatan BMN, dan laporan pemanfaatan.
	PL.02.06	Pemindahtanganan BMN

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemindahtanganan BMN seperti usulan pemindahtanganan barang/BMN, penawaran hibah BMN, dan berita acara pemindahtanganan BMN.
	PL.02.07	<p>Penghapusan BMN</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan BMN mulai dari daftar inventaris barang rusak, usulan daftar BMN yang akan dihapus, daftar BMN yang dinilai kembali, Keputusan Tim penghapusan BMN, Keputusan persetujuan penghapusan, Berita Acara Penghapusan BMN, lelang BMN, dan laporan.</p>
	PL.02.08	<p>Pengamanan/Pengawasan BMN</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan/pengawasan BMN seperti laporan pengamanan/pengawasan fisik BMN.</p>
	PL.02.09	<p>Pelaporan BMN</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan BMN seperti Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Laporan BMN (<i>unaudited</i>, <i>audited</i>, dan semesteran), Unit Kuasa Pengguna Barang (UKPB), Kuasa Pengguna Barang (KPB).</p>
	<b>PL.03</b>	<p><b>Bukti-Bukti Kepemilikan Aset</b></p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bukti kepemilikan aset seperti sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), denah/gambar teknik bangunan, dan denah instalasi listrik/saluran air dan gas/jaringan internet.</p>
<b>TU</b>	<b>KETATAUSAHAAN</b>	
	<b>TU.00</b>	<b>Keprotokolan</b>
	TU.00.00	<p>Upacara Kedinasan (Upacara Bendera, Upacara Hari Besar, Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan, dan Peresmian)</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara kedinasan seperti upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara bendera dan peringatan hari besar mulai dari undangan/pemberitahuan, susunan acara, berita acara, naskah serah terima, surat perintah tugas, dan sambutan/pidato.</p>

	TU.00.01	Kunjungan Kedinasan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kunjungan kedinasan/kunjungan kerja presiden/ menteri/pimpinan lembaga/instansi/pejabat eselon I/tamu negara/pejabat lain/pegawai dan surat perintah tugas kunjungan kedinasan.
	TU.00.02	Agenda Kegiatan Pimpinan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan agenda kegiatan pimpinan Kejaksaan RI seperti jadwal kegiatan.
	TU.00.03	Daftar Nama dan Alamat Pejabat Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan daftar nama/alamat kantor/profil pimpinan/ pejabat
<b>TU.01</b>	<b>Perjalanan Dinas Pimpinan</b>	
	TU.01.00	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas dalam negeri seperti undangan, surat perintah perjalanan dinas, surat perjalanan dinas, agenda acara kegiatan.
	TU.01.01	Perjalanan Dinas Luar Negeri Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar negeri seperti surat perintah perjalanan dinas, surat perjalanan dinas, agenda acara, surat permohonan pengurusan paspor, visa, <i>exit permit</i> , izin perjalanan luar negeri, dan lain-lain.
<b>TU.02</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat</b>	
	TU.02.00	Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan, undangan rapat, materi rapat, daftar hadir, dan notula rapat.
	TU.02.01	Penyelenggaraan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakernas)/rapat kerja tekns (Rakernis)/Rapat Koordinasi (Rakor), undangan rapat, materi rapat, daftar hadir, dan notula rapat.
	TU.02.02	Penyelenggaraan Rapat Staf Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan rapat staf, undangan rapat, materi rapat, daftar hadir, dan notula.

<b>RT</b>	<b>KERUMAHTANGGAAN</b>	
	<b>RT.00</b>	<b>Pengurusan Penggunaan Sarana Telekomunikasi: Telepon, Teleks, Televisi Kabel, Internet, dan Sarana Telekomunikasi Lainnya.</b>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sarana telekomunikasi meliputi administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi telepon, faksimile, radio, teleks, televisi kabel, dan internet mulai dari surat permohonan penggunaan, rekening tagihan, bukti pembayaran, surat pemberitahuan keterlambatan membayar/denda, dan surat pemberitahuan pemutusan jaringan.
	<b>RT.01</b>	<b>Pengurusan Penggunaan Fasilitas Kantor: Ruangan, Gedung, Wisma, Rumah Dinas, Rumah Tahanan, Kendaraan, dan Fasilitas Kantor Lainnya</b>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi surat izin/isian formulir penggunaan fasilitas kantor dan surat persetujuan/penolakan penggunaan fasilitas kantor seperti ruangan, gedung, wisma, rumah dinas, rumah tahanan, kendaraan, dan fasilitas kantor lainnya.
	<b>RT.02</b>	<b>Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi</b>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi meliputi surat permohonan penyediaan konsumsi/akomodasi dan surat persetujuan/penolakan penyediaan konsumsi/akomodasi.
	<b>RT.03</b>	<b>Pengurusan Kendaraan Dinas</b>
	RT.03.00	Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat kendaraan dinas.
	RT.03.01	Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas.
	RT.03.02	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan Dinas
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan dinas.
	<b>RT.04</b>	<b>Pemeliharaan Gedung dan Taman</b>
	RT.04.00	Berkas Pemeliharaan Pertamanan/ <i>Landscaping</i>
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pertamanan/ <i>landscaping</i> .	

	RT.04.01	Berkas Pelaksanaan Penghijauan di Lingkungan Gedung/Kantor Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penghijauan di lingkungan gedung/kantor.
	RT.04.02	Berkas Perbaikan Gedung Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan gedung.
	RT.04.03	Berkas Perbaikan Rumah Dinas/Wisma Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan rumah dinas/wisma.
	RT.04.04	Berkas Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Taman Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan gedung dan taman.
<b>RT.05</b>	<b>Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer</b>	
	RT.05.00	Perbaikan/Pemeliharaan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer mulai dari surat izin/formulir permohonan perbaikan jaringan listrik, telepon dan komputer, surat persetujuan/penolakan perbaikan jaringan listrik, telepon dan komputer, perbaikan jaringan listrik, telepon, dan komputer.
	RT.05.01	Pemasangan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer mulai dari surat permohonan pemasangan kebutuhan jaringan listrik, telepon, dan komputer dari unit kerja, surat persetujuan/penolakan pemasangan jaringan listrik, telepon dan komputer
<b>RT.06</b>	<b>Pakaian Dinas Pegawai, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Pegawai Lainnya</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pakaian dinas pegawai, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya mulai dari usulan pengadaan pakaian dinas, desain pakaian dinas, dan tanda terima pendistribusian pakaian dinas.	
<b>KM</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	
	<b>KM.00</b>	<b>Keamanan</b>
	KM.00.00	Pengawasan Pimpinan

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengawalan pimpinan mulai dari surat permintaan, surat tugas pengawalan, dan laporan pelaksanaan pengawalan.
	KM.00.01	Petugas Pengamanan ( <i>security</i> ) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan petugas pengamanan ( <i>security</i> ) termasuk daftar jaga/piket, daftar petugas, surat izin keluar/masuk kantor di luar jam kerja, dan laporan pelaksanaan tugas pengamanan.
	KM.00.02	Laporan Kejadian Gangguan Keamanan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kejadian gangguan keamanan.
	KM.00.03	Bantuan Pengamanan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bantuan pengamanan mulai dari surat permohonan bantuan pengamanan, surat tugas pengamanan, dan laporan pelaksanaan pengamanan.
	<b>KM.01</b>	<b>Ketertiban</b>
	KM.01.00	Pengelolaan Parkir Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir termasuk surat/nota pengurusan dan pengaturan ketertiban parkir serta data kendaraan parkir.
	KM.01.01	Ketertiban Lingkungan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan ketertiban lingkungan termasuk surat/nota pengurusan dan pengaturan ketertiban lingkungan serta laporan ketertiban lingkungan.
<b>KA</b>	<b>KEARSIPAN</b>	
	<b>KA.00</b>	<b>Penciptaan Arsip</b>
	KA.00.00	Pengelolaan Surat Masuk Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan agenda surat masuk (manual/elektronik) dan tanda terima
	KA.00.01	Pengelolaan Surat Keluar Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan surat keluar antara lain buku agenda penomoran surat (manual/elektronik), daftar surat pertinggal, nota dinas permintaan unit kerja dan buku pendistribusian.

<b>KA.01</b>	<b>Pemeliharaan Arsip</b>	
	KA.01.00	<p>Pemberkasan</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberkasan arsip seperti daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas), formulir peminjaman arsip, buku catatan peminjaman arsip.</p>
	KA.01.01	<p>Penataan Arsip</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penataan arsip seperti daftar arsip inaktif, formulir peminjaman arsip inaktif dan buku catatan peminjaman arsip inaktif.</p>
	KA.01.02	<p>Penyimpanan</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan arsip seperti skema penataan arsip peta lokasi penyimpanan arsip, <i>checklist</i> pengaturan suhu dan temperatur ruang penyimpanan, pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi).</p>
	KA.01.03	<p>Alih Media Arsip</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan alih media arsip seperti berita acara alih media arsip dan daftar arsip yang dialihmediakan.</p>
	KA.01.04	<p>Akses Penggunaan Arsip</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akses penggunaan arsip seperti buku peminjaman arsip dan formulir peminjaman.</p>
<b>KA.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga</b>	
	<p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, serta berita acara penyerahan salinan arsip terjaga.</p>	
<b>KA.03</b>	<b>Penyusutan Arsip</b>	
	KA.03.00	<p>Pemindahan Arsip Inaktif</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif seperti berita acara pemindahan arsip dan daftar arsip yang dipindahkan.</p>
	KA.03.01	<p>Pemusnahan Arsip</p> <p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemusnahan arsip seperti Keputusan tim pemusnahan, surat usulan pemusnahan, rekomendasi/pertimbangan/persetujuan pemusnahan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Keputusan pemusnahan, berita acara pemusnahan dan daftar arsip musnah.</p>

	KA.03.02	Penyerahan Arsip Statis Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis seperti surat usulan penyerahan arsip statis, rekomendasi/pertimbangan/persetujuan penyerahan arsip, berita acara penyerahan arsip statis, dan daftar arsip usul serah.
<b>KA.04</b>	<b>Pembuatan Sistem Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip)</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan sistem kearsipan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis, dan pedoman kearsipan lainnya.	
<b>KA.05</b>	<b>Pembinaan Kearsipan</b>	
	KA.05.00	Bimbingan Teknis Kearsipan/Bimbingan Konsultasi Kearsipan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis kearsipan/bimbingan konsultasi kearsipan seperti perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
	KA.05.01	Supervisi/Pengawasan Kearsipan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi/pengawasan kearsipan seperti perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil supervisi/pengawasan kearsipan.
	KA.05.02	<i>Monitoring</i> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia seperti perencanaan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan hasil <i>monitoring</i> .
<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
	<b>PW.00</b>	<b>Program Kerja Pengawasan Tahunan</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
	<b>PW.01</b>	<b>Audit/Pengawasan Internal</b>
	PW.01.00	Audit Keuangan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit/pengawasan lingkup administrasi umum/keuangan.
	PW.01.01	Audit Kinerja Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit/pengawasan lingkup kinerja kelembagaan.

<b>PW.02</b>	<b>Reviu</b>	
	PW.02.00	Reviu Anggaran Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu anggaran.
	PW.02.01	Reviu Kinerja Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu kinerja.
	PW.02.02	Reviu Barang Milik Negara Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu Barang Milik Negara.
	<b>PW.03</b>	<b>Pemantauan</b>
	PW.03.00	Pemantauan Kegiatan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan kegiatan seperti Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK), <i>monitoring</i> reformasi birokrasi dan pengawasan PNBPN, dan lain-lain.
PW.03.01	Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti rugi/kerugian negara seperti laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, Keputusan tanggung jawab mutlak, surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, Keputusan penghapusan uang dan barang, laporan penyelesaian TP/TGR.	
PW.03.02	Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.	
<b>PW.04</b>	<b>Pemeriksaan</b>	
	PW.04.00	Pemeriksaan Terkait Dugaan Disiplin Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan terkait dugaan disiplin seperti hasil telaah, klarifikasi, inspeksi kasus, berita acara permintaan keterangan, usul rencana hukuman disiplin, Keputusan penjatuhan hukuman disiplin, permohonan banding administratif, dan Keputusan ketetapan banding.
	PW.04.01	Inspeksi Umum Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi umum.
	PW.04.02	Inspeksi Khusus Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi khusus.

	PW.04.03	Inspeksi Pimpinan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi pimpinan.
	PW.04.04	Pendampingan Pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pengawasan eksternal seperti laporan hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi
<b>PW.05</b>	<b>Gratifikasi dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan gratifikasi dan WBS seperti pelaporan gratifikasi/WBS, Keputusan Tim dan laporan.	
<b>PW.06</b>	<b>Pengaduan Masyarakat (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (SP4N Lapor)/Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli))</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat (SP4N Lapor/Saber Pungli).	
<b>PW.07</b>	<b>Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian LHKPN.	
<b>PW.08</b>	<b>Benturan Kepentingan/ <i>Conflict of Interest</i> (CoI)</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan benturan kepentingan/ <i>Conflict of Interest</i> (CoI) seperti peta potensi adanya benturan kepentingan, tindak lanjut terhadap peta potensi, Keputusan benturan kepentingan, dan laporan benturan kepentingan.	
<b>PW.09</b>	<b>Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Zona Integritas</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan WBK, WBBM dan pembangunan Zona Integritas.	
<b>PW.10</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Lainnya</b>	
	PW.10.00	Sosialisasi Pengawasan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan edukasi/sosialisasi pengawasan.
	PW.10.01	Bimbingan, Konsultasi dan Asistensi Pengawasan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan, konsultasi dan asistensi pengawasan.
	PW.10.02	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
	PW.10.03	Pemaparan Hasil Pengawasan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemaparan hasil pengawasan.
	PW.10.04	Keikutsertaan Dalam Forum APIP Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam forum APIP.
	PW.10.05	Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan SPI/SPIP.
<b>DI</b>	<b>DATA DAN INFORMASI</b>	
<b>DI.00</b>	<b>Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> Pembangunan Sistem Informasi</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana strategis/ <i>master plan</i> pembangunan sistem informasi.	
<b>DI.01</b>	<b>Rencana Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.	
<b>DI.02</b>	<b>Rancang Bangun Sistem/Desain Sistem Informasi Dan Komunikasi</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rancang bangun sistem/desain sistem informasi dan komunikasi.	
<b>DI.03</b>	<b>Dokumentasi Arsitektur</b>	
	DI.03.00	Aplikasi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi arsitektur aplikasi seperti <i>e-sign</i> dan <i>e-mail</i> .
	DI.03.01	Infrastruktur dan Keamanan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur dan keamanan sistem informasi.
	DI.03.02	Penambahan <i>Storage</i> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penambahan <i>storage</i> .
	DI.03.03	Pembuatan Konten Media Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan konten media.
<b>DI.04</b>	<b>Dokumentasi Implementasi, Operasional dan Pemeliharaan</b>	
	DI.04.00	Implementasi, Operasional dan Pemeliharaan Aplikasi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan implementasi, operasional, dan pemeliharaan aplikasi.

	DI.04.01	Implementasi, Operasional, Pemeliharaan, Infrastruktur, dan Keamanan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan implementasi, operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan keamanan.
	DI.04.02	Implementasi Aplikasi Komunikasi/ <i>Meeting</i> . Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan implementasi aplikasi komunikasi/ <i>meeting</i> seperti permintaan <i>video conference</i> dan <i>zoom meeting</i> .
<b>DI.05</b>	<b>Perekaman dan Pemutakhiran Data</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data seperti formulir isian hingga laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data.	
<b>DI.06</b>	<b>Migrasi dan Integrasi Data/ Aplikasi</b>	
	DI.06.00	Jaringan dan Server Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan dan server seperti pasang baru, relokasi, dan pemeliharaan jaringan.
	DI.06.01	Data dan Aplikasi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan aplikasi.
	DI.06.02	Evaluasi Teknologi Informasi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi teknologi informasi seperti laporan kerusakan, laporan perangkat, laporan aplikasi, dan laporan jaringan.
<b>DI.07</b>	<b>Keamanan Data</b>	
	DI.07.00	<i>Backup Data</i> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan <i>back up</i> data digital.
	DI.07.01	Antivirus Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan data menggunakan antivirus.
	DI.07.02	<i>Firewall</i> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan data menggunakan <i>firewall</i> .
<b>DI.08</b>	<b>Hardware</b> Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan <i>hardware</i> .	
<b>DI.09</b>	<b>Dokumen <i>Hosting</i> dan Domain</b>	

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen <i>hosting</i> seperti formulir permintaan <i>hosting</i> , laporan hasil uji kelayakan, dan laporan pelaksanaan <i>hosting</i> .
<b>DI.10</b>	<b>Pengumpulan dan Pengolah Data</b>	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data.
<b>DI.11</b>	<b>Analisis Data</b>	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisis data.
<b>DI.12</b>	<b>Penyajian dan Pemanfaatan Data</b>	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyajian dan pemanfaatan data.
<b>DI.13</b>	<b>Database</b>	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>database</i> .
<b>DI.14</b>	<b>Keanggotaan/Langgan/Jaringan</b>	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keanggotaan/langganan/jaringan.
<b>PT</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
<b>PT.00</b>	<b>Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka</b>	
PT.00.00	Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit.
PT.00.01	Penyerahan Karya Cetak/Karya Rekam Bahan Pustaka	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bukti penyerahan karya cetak/karya rekam bahan pustaka.
PT.00.02	Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan deposit bahan pustaka.
<b>PT.01</b>	<b>Pengadaan Bahan Pustaka</b>	
PT.01.00	Seleksi Bahan Pustaka	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan seleksi bahan pustaka.
PT.01.01	Pemesanan Bahan Pustaka	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemesanan bahan pustaka.
PT.01.02	Penerimaan Bahan Pustaka	
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan bahan pustaka.

	<b>PT.02</b>	<b>Pengolahan Bahan Pustaka</b>
	PT.02.00	Inventarisasi Bahan Pustaka
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi bahan pustaka seperti buku induk koleksi.
	PT.02. 01	Pengelolaan Bahan Pustaka Surplus
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan bahan pustaka surplus.
	<b>PT.03</b>	<b>Layanan Bahan Pustaka dan Informasi</b>
PT.03.00	Layanan Peminjaman dan Pengembalian	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan peminjaman dan pengembalian.	
PT.03.01	Layanan Pembuatan e-Kliping	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan pembuatan e-kliping.	
PT.03.02	Layanan Penelusuran Informasi	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan penelusuran informasi.	
PT.03.03	Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka.	
<b>PT.04</b>	<b>Pemeliharaan Bahan Pustaka</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan bahan pustaka.	
<b>KY.</b>	<b>KESEHATAN YUSTISIAL</b>	
	<b>KY.00</b>	<b>Dewan, Badan dan Komite Kesehatan</b>
	KY.00.00	Dewan Pengawas
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data dewan pengawas layanan kesehatan seperti usulan anggota dewan pengawas dan Keputusan dewan pengawas.
	KY.00.01	Dewan Pembina
Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data dewan pembina layanan kesehatan seperti usulan anggota dewan pembina dan Keputusan dewan pembina.		

	KY.00.02	Badan Koordinasi Pendidikan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data badan koordinasi pendidikan layanan kesehatan seperti usulan anggota badan koordinasi pendidikan dan Keputusan badan koordinasi pendidikan.
	KY.00.03	Komite Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data komite layanan kesehatan seperti usulan anggota komite dan Keputusan komite.
<b>KY.01</b>	<b>Tenaga Kesehatan</b>	
	KY.01.00	Medik dan Keperawatan Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tenaga medik dan keperawatan seperti usulan tenaga medik dan keperawatan dan Keputusan tenaga medik dan keperawatan.
	KY.01.01	Non Medik Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tenaga non medik seperti usulan tenaga non medik dan Keputusan tenaga non medik.
	KY.01.02	Dokter Tamu Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokter tamu seperti usulan dokter tamu dan Keputusan dokter tamu.
<b>KY.02</b>	<b>Penunjang Medik</b>	
	KY.02. 00	Laboratorium Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laboratorium.
	KY.02. 01	Radiologi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan radiologi.
	KY.02. 02	Fisioterapi Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fisioterapi.
	KY.02. 03	Ambulans Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ambulans.
	KY.02. 04	Penunjang Medik Lainnya Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penunjang medik lainnya.

<b>KY.03</b>	<b>Rekam medik</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rekam medik.	
<b>KY.04</b>	<b>Farmasi</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan farmasi seperti daftar obat, daftar suplier dan alat kesehatan habis pakai.	
<b>KY.05</b>	<b>Kegiatan Akademik dan Riset Layanan Kesehatan</b>	
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan riset layanan kesehatan seperti renstra riset rumah sakit, proposal/TOR, hasil riset, evaluasi, dan laporan.	
<b>KY.06</b>	<b>Administrasi Layanan Kesehatan</b>	
	KY.06.00	Rujukan Fasilitas Kesehatan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rujukan fasilitas kesehatan seperti surat penerimaan rujukan dan surat pemberian rujukan.
	KY.06.01	Asuransi
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan asuransi kesehatan seperti surat permohonan klaim asuransi.
	KY.06.02	Pemulasaran Jenazah
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah seperti berita acara pemulasaran jenazah.	
<b>KY.07</b>	<b>Legalitas Tenaga Kesehatan</b>	
	KY.07.00	Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan STR tenaga kesehatan.
	KY.07.01	Surat Izin Praktik Profesi Tenaga Kesehatan
	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan surat izin praktek profesi tenaga Kesehatan.	
<b>KY.08</b>	<b>Laporan Kegiatan Layanan Kesehatan</b>	
	KY.08.00	Laporan <i>co assistant (coass)</i>
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan <i>coass</i> seperti permohonan <i>coass</i> , persetujuan/penolakan, jadwal pelaksanaan <i>coass</i> , presensi, laporan, dan surat keterangan melakukan <i>coass</i> .
	KY.08.01	Laporan Kelahiran
		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kelahiran seperti rekapitulasi tingkat kelahiran.
KY.08.02	Laporan Kematian	

		Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kematian seperti rekapitulasi tingkat kematian.
KY.08.03	Laporan Kejadian Kecelakaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kejadian kecelakaan dan data kejadian kecelakaan.
KY.08.04	Laporan Perkembangan Pasien	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan perkembangan pasien, data statistic, dan rekapitulasi data kesehatan.
KY.08.05	Laporan Kasus Terbanyak	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kasus terbanyak.
KY.08.06	Laporan Kasus Khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kasus khusus dan data statistik kasus khusus.
KY.08.07	Laporan Rutin Kesehatan Yustisial	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan rutin layanan kesehatan yustisial.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN